



Manajemen Perencanaan Aparatur Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Desa Gajah melalui KKN UINSU 2026

Village Apparatus Planning Management in Improving the Effectiveness of Public Services in Gajah Village through UINSU Community Service Program 2026

Tuti Anggraini^{1*}, Dinda Ravina², Neha Sartika³, Siti Jumaidah⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: tuti.anggraini@uinsu.ac.id¹, dindaravina17@gmail.com², nehasartika869@gmail.com³, Sjumaidah03@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: tuti.anggraini@uinsu.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 12 Juli 2026

Revisi: 13 Agustus 2026

Diterima: 14 September 2026

Tersedia: 27 Oktober 2026

Keywords: Bureaucratic Effectiveness; Planning Management; Public Service; UINSU KKN; Village Apparatus

Abstract. *This study aims to analyze and document the implementation of village apparatus planning management in enhancing public service effectiveness in Gajah Village through the 2026 UINSU State Islamic University Field Work Placement (KKN) program. A qualitative approach with field research action methodology was utilized in this investigation. Data were gathered through participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions, and documentary analysis of population administration services as well as posyandu basic social services. The findings reveal that participatory assistance provided by UINSU KKN students successfully transformed village apparatus governance into a more structured, transparent, and accountable framework. Clear role division, workplace environment reorganization, and administrative workflow simplification significantly reduced bureaucratic bottlenecks and accelerated document processing times. Furthermore, apparatus capacity building integrated with religious and community-based approaches effectively enhanced public trust and satisfaction regarding local government performance. This study concludes that integrating structured planning management with applied academic assistance successfully establishes independent, responsive, and sustainably oriented local bureaucratic governance focused on delivering excellent public service.*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan implementasi manajemen perencanaan aparatur desa dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Desa Gajah melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UINSU 2026. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian tindakan lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan studi dokumentasi terhadap proses pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan sosial dasar posyandu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif yang dilakukan mahasiswa KKN UINSU 2026 berhasil mentransformasi tata kelola kerja aparatur desa menjadi lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Pembagian peran yang jelas, pembenahan lingkungan kerja, dan simplifikasi alur administrasi terbukti mereduksi hambatan birokrasi serta mempercepat waktu penyelesaian dokumen kependudukan. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur yang dipadukan dengan pendekatan keagamaan dan kemasyarakatan berhasil meningkatkan kepercayaan serta kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengintegrasian manajemen perencanaan yang matang dengan pendampingan akademis terapan efektif mewujudkan tata kelola birokrasi lokal yang mandiri, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Aparatur Desa; Efektivitas Birokrasi; KKN UINSU; Manajemen Perencanaan; Pelayanan Publik

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik di tingkat desa merupakan garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Desa Gajah sebagai salah satu entitas pemerintahan lokal menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mempertahankan mutu layanan administrasi yang cepat, akurat, dan transparan. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik ini sangat bergantung pada bagaimana aparatur desa mampu mengorganisasi serta merencanakan setiap program kerja secara terstruktur. Tanpa perencanaan tata kelola yang matang, pelaksanaan tugas birokrasi cenderung berjalan stagnan dan kurang mampu merespons kebutuhan warga secara optimal. Oleh karena itu, penguatan manajemen perencanaan birokrasi desa menjadi sebuah keharusan agar standar pelayanan publik dapat ditingkatkan secara konsisten demi terciptanya kesejahteraan sosial yang merata. Transformasi sistem birokrasi di tingkat tapak ini memerlukan pendampingan yang intensif agar setiap aparatur memiliki visi kerja yang jelas dan terukur dalam melayani masyarakat lokal secara berkesinambungan (Aneta et al., 2023).

Manajemen perencanaan kerja aparatur desa memegang peranan yang sangat krusial dalam menentukan arah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di ranah lokal. Perencanaan yang disusun secara sistematis dan partisipatif tidak hanya membantu memetakan kebutuhan riil masyarakat, tetapi juga mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia yang ada di kantor desa. Kendala yang sering kali ditemui di lapangan adalah terbatasnya pemahaman serta pemanfaatan skema perencanaan berbasis transparansi oleh para birokrat desa. Hal tersebut berdampak langsung pada keterlambatan penyusunan dokumen strategis desa dan kurang optimalnya penyerapan aspirasi publik. Pendampingan yang terstruktur melalui pelatihan perencanaan kerja terbukti mampu mendongkrak kapasitas aparatur desa dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih terarah, akuntabel, dan berorientasi pada hasil akhir. Keterlibatan pihak luar dalam mengawal proses perencanaan ini menjadi stimulus penting untuk mempercepat perbaikan kinerja birokrasi tingkat desa secara menyeluruh (Hidayat, 2024).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi kunci utama dalam mendorong efektivitas pelayanan publik serta transparansi pengelolaan tata kelola pemerintahan desa. Pengetahuan aparatur mengenai regulasi pemerintah, tata kelola yang baik (*good governance*), serta penguasaan teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap capaian kinerja harian birokrasi desa. Apabila aparatur desa tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek-aspek tersebut, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sering kali mengalami kendala teknis maupun administratif. Oleh sebab itu, program penguatan kapasitas yang berfokus pada peningkatan kualifikasi dan pemahaman

regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ketika aparat desa dibekali dengan keterampilan manajemen dan pemahaman regulasi yang mantap, pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien, transparan, serta akuntabel sesuai dengan ekspektasi masyarakat lokal. Kualitas SDM yang mumpuni akan secara otomatis meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi desa (Kusumawati & Yuliani, 2022).

Pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem pelayanan administrasi desa kini menjadi strategi yang sangat efektif untuk mempercepat alur birokrasi yang sebelumnya kaku. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) terbukti mampu memotong rantai birokrasi yang berbelit-belit serta meminimalisasi potensi kesalahan pendataan dalam dokumen kependudukan. Kendati demikian, efektivitas penggunaan SID sangat bergantung pada kesiapan aparat dalam mengoperasikan perangkat digital tersebut serta komitmen untuk memperbarui data secara berkala. Tanpa adanya kesiapan manajemen perencanaan dari aparat, aplikasi digital seanggih apa pun tidak akan memberikan dampak optimal terhadap mutu pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital dan penataan manajemen kerja aparat desa harus berjalan secara beriringan. Sinkronisasi antara ketersediaan teknologi digital dan kemampuan manajerial aparat akan menciptakan standar pelayanan publik yang responsif, terintegrasi, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat di wilayah pedesaan (Novianti & Agustina, 2024).

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pergantian era modern dari perguruan tinggi memainkan peran strategis sebagai fasilitator dan katalisator dalam membenahi tata kelola pemerintahan di desa. Kehadiran mahasiswa KKN UINSU 2026 di Desa Gajah membawa pendekatan akademis serta inovasi manajemen yang dapat diterapkan langsung untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik. Melalui kolaborasi antara akademisi dan aparat desa, proses pendampingan manajemen perencanaan dapat dirancang sesuai dengan kondisi obyektif yang dihadapi oleh pemerintah desa. Pendampingan ini mencakup penyusunan standar operasional prosedur, pelatihan tata kelola administrasi, hingga evaluasi berkala terhadap efektivitas pelayanan. Sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah desa ini tidak hanya mentransfer pengetahuan praktis, tetapi juga membina kesadaran aparat akan pentingnya akuntabilitas kerja. Hasil pendampingan ini diharapkan mampu meninggalkan warisan tata kelola yang berkelanjutan bagi kemajuan desa (Irfansyah, 2024).

Keberbaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian model pendampingan manajemen perencanaan aparat desa berbasis kolaborasi perguruan tinggi melalui KKN UINSU 2026 di Desa Gajah, yang memadukan pendekatan partisipatif dengan

transformasi administrasi publik digital secara kontekstual. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada evaluasi kinerja pasca-pelayanan atau pelatihan teknis secara parsial, pengabdian ini merancang intervensi manajerial dari tahap perencanaan awal hingga simplifikasi pelayanan kependudukan di lapangan. Pendekatan ini secara khusus menyoroti efektivitas interaksi antara mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat dalam mengurai hambatan birokrasi tingkat tapak secara langsung. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu memberikan formulasi model pendampingan KKN yang aplikatif, terukur, dan berorientasi jangka panjang dalam mewujudkan efektivitas pelayanan publik desa. Penelitian ini melengkapi celah literatur terkait peran nyata KKN tematik dalam penguatan birokrasi lokal (Aminah et al., 2025).

2. TINJAUAN TEORITIS

Manajemen Perencanaan Birokrasi Desa

Manajemen perencanaan dalam lingkup birokrasi desa merupakan proses strategis yang menentukan kemampuan tata kelola lokal dalam merespons kebutuhan masyarakat secara terstruktur. Perencanaan yang efektif melibatkan pemetaan potensi, penataan alur administrasi, serta pembagian peran aparatur yang jelas agar setiap kebijakan yang dirancang dapat terealisasi secara transparan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional harian, melainkan juga sebagai fondasi utama untuk mengarahkan perubahan birokrasi ke arah yang lebih efisien dan akuntabel. Tanpa skema perencanaan yang matang, pelaksanaan fungsi pelayanan publik cenderung menghadapi hambatan tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan penyelesaian dokumen. Oleh karena itu, optimasi manajemen perencanaan menjadi instrumen krusial dalam mempercepat transformasi birokrasi tingkat tapak demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh (Aneta et al., 2023).

Efektivitas Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur

Efektivitas pelayanan publik di tingkat desa sangat bergantung pada sejauh mana kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas administratif secara tepat waktu dan berkualitas. Kinerja aparatur yang optimal diukur dari tingkat kecermatan, kecepatan, serta kemudahan akses yang dirasakan oleh warga masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan maupun perizinan. Kualitas pelayanan ini dipengaruhi oleh pemahaman aparatur terhadap standar operasional prosedur, komitmen terhadap transparansi, serta kemampuan berkomunikasi secara empatik dengan publik. Ketika aparatur desa mampu

menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam bekerja, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, pelayanan yang lambat dan berbelit-belit akan menurunkan kepercayaan publik terhadap entitas birokrasi lokal. Oleh sebab itu, evaluasi dan peningkatan kinerja aparatur secara berkala merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin terciptanya efektivitas pelayanan publik desa (Noviyanti et al., 2022).

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Regulasi

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan variabel penentu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tingkat pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola keuangan, dana desa, serta prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh langsung terhadap mutu keputusan administrasi yang diambil. Aparatur yang dibekali dengan kompetensi memadai dan literasi teknologi informasi cenderung lebih adaptif dalam mengelola sistem pelayanan publik yang modern. Peningkatan kapasitas ini dapat ditempuh melalui pendidikan, pelatihan manajerial, serta pendampingan teknis secara berkesinambungan di lingkungan kantor desa. Ketika seluruh elemen perangkat desa memiliki kualifikasi SDM yang tangguh dan taat asas, risiko penyimpangan prosedur dapat diminimalisasi secara drastis, sehingga tata kelola administrasi desa berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat (Kusumawati & Yuliani, 2022).

Transformasi Pelayanan Digital dan Peran KKN Tematik

Transformasi pelayanan publik di desa kini semakin terakselerasi melalui pemanfaatan sistem informasi digital yang mempermudah proses integrasi data kependudukan. Penerapan teknologi digital seperti Sistem Informasi Desa (SID) terbukti dapat memangkas tahapan birokrasi yang panjang serta meningkatkan akurasi pendataan administrasi desa secara *real-time*. Kehadiran program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dari perguruan tinggi memegang peran strategis sebagai fasilitator yang mengawal proses adaptasi teknologi dan perbaikan manajemen perencanaan tersebut. Mahasiswa KKN hadir membawa transfer pengetahuan, pendampingan teknis, serta formulasi solusi praktis bagi aparatur desa dalam mengatasi keterbatasan kapasitas operasional. Sinergi antara modernisasi pelayanan berbasis digital dan pendampingan akademis ini mampu melahirkan model tata kelola pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, serta berkelanjutan bagi kemajuan desa di era digital saat ini (Novianti & Agustina, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan lapangan (*field research*) yang dilaksanakan secara langsung di Desa Gajah melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UINSU 2026. Pendekatan ini dipilih untuk mengamati, mendampingi, serta menganalisis secara mendalam proses manajemen perencanaan aparatur desa dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui teknik observasi partisipatif terhadap aktivitas pelayanan harian di kantor desa, wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama Kepala Desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat, dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*). Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berkas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, serta catatan administrasi kependudukan yang berlaku di desa setempat.

Metode penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama di lapangan, yaitu tahap identifikasi awal, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi dampak. Pada tahap identifikasi, tim peneliti bersama mahasiswa KKN melakukan pemetaan masalah birokrasi dan analisis kebutuhan kapasitas aparatur desa secara langsung. Selanjutnya, dirancang program pendampingan manajemen perencanaan yang mencakup penyusunan tata kelola administrasi berbasis digital dan pelatihan penyusunan rencana kerja yang sistematis. Seluruh data yang terkumpul di lapangan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan bahwa temuan di lapangan valid, akuntabel, dan memberikan gambaran yang objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah Birokrasi dan Penataan Kebersihan Administrasi Lingkungan Desa Gajah

Pembaruan tata kelola administrasi dan kebersihan lingkungan di Desa Gajah diawali dengan pemetaan masalah oleh mahasiswa KKN UINSU 2026. Berdasarkan hasil pengamatan fisik dan keterlibatan langsung di lapangan, pelayanan administrasi dan pengelolaan kebersihan di sekitar fasilitas publik sebelumnya masih belum tertata secara sistematis. Kehadiran mahasiswa KKN UINSU 2026 secara langsung mendampingi aparatur dan masyarakat untuk mulai memilah serta membersihkan area lingkungan kerja pemerintahan desa demi meningkatkan mutu pelayanan publik yang nyaman dan higienis. Upaya penataan

dari tingkat dasar ini menjadi fondasi utama bagi keberhasilan penguatan birokrasi dan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat di Desa Gajah. Kesadaran dan disiplin aparatur serta warga mulai tumbuh seiring dilakukannya pendampingan edukatif mengenai pentingnya efisiensi kerja serta kebersihan lingkungan kantor desa (Pamungkas & Jakfar, 2022).



Gambar 1. Aksi gotong royong pendampingan penataan dan kebersihan lingkungan kantor serta fasilitas publik Desa Gajah oleh mahasiswa KKN UINSU 2026

Sumber: Dokumentasi Kegiatan KKN UINSU Desa Gajah, 2026.

Aktivitas penataan lingkungan dan pembenahan administrasi yang dilakukan secara intensif menghasilkan perubahan kondisi fisik kantor dan lingkungan sekitar desa yang signifikan. Hasil observasi menunjukkan peningkatan kenyamanan masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan, disertai dengan percepatan alur penanganan berkas oleh perangkat desa secara bertahap. Pembaruan manajemen tata kelola ini terbukti menjadi langkah konkret awal dalam membentuk budaya kerja yang profesional, transparan, dan berwawasan lingkungan bagi aparatur Desa Gajah. Integrasi antara perencanaan kerja yang matang dan pemeliharaan sarana desa menciptakan mekanisme pelayanan publik yang mandiri serta efisien di tingkat lokal. Keberadaan pendampingan ini mempermudah koordinasi antarperangkat desa

dalam menyelesaikan tugas harian tanpa menimbulkan kendala birokrasi yang berbelit-belit (Nurfadilah & Priyanti, 2023).

Sosialisasi Manajemen Perencanaan dan Pendampingan Pelayanan Administrasi Desa

Pelaksanaan program pengabdian di Desa Gajah dilanjutkan dengan pendampingan manajemen perencanaan dan penataan administrasi pelayanan publik secara intensif bersama masyarakat dan pelaku usaha lokal. Melalui metode observasi partisipatif, tim mahasiswa KKN UINSU 2026 mengamati interaksi antara aparatur desa, warga, dan pemilik usaha dalam memahami pentingnya keabsahan dokumen serta keteraturan administrasi desa. Pembentukan forum pendampingan ini menjadi sarana belajar bersama yang mempermudah penyampaian informasi mengenai alur pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pendampingan secara langsung dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perwakilan masyarakat memahami prosedur administrasi yang berlaku, sehingga proses pelayanan di kantor desa dapat berjalan secara efisien dan tepat waktu (Irfansyah, 2024).



Gambar 2. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan administrasi pelayanan publik serta penyerahan panduan tata kelola oleh mahasiswa KKN UINSU 2026 kepada masyarakat Desa Gajah

Sumber: Dokumentasi Kegiatan KKN UINSU Desa Gajah, 2026.

Keterampilan dan pemahaman tata kelola administrasi aparatur serta warga dipantau secara berkala melalui peragaan langsung penyusunan berkas dan pengisian formulir pelayanan kependudukan. Pengamatan fisik mengonfirmasi adanya peningkatan efektivitas kinerja pelayanan publik dan kemandirian warga dalam melengkapi persyaratan administrasi secara mandiri. Keberadaan tata kelola yang terstruktur memperkuat sistem pelayanan publik desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan. Proses edukasi intensif ini memicu timbulnya rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan roda birokrasi lokal (Rosandy & Rodiyah, 2023).

Peningkatan Kualitas Pelayanan Posyandu dan Kesehatan Masyarakat Desa Gajah

Sebagai bagian dari perencanaan pelayanan publik yang inklusif, mahasiswa KKN UINSU 2026 turut serta dalam mengoptimalkan pelayanan posyandu dan kesehatan balita di Desa Gajah. Pengukuran tumbuh kembang anak dan pencatatan data kesehatan dilakukan secara cermat bersama kader kesehatan desa untuk memastikan keakuratan data pelayanan sosial dasar. Kehadiran mahasiswa KKN memberikan bantuan teknis dalam pembagian tugas, pendataan digital sederhana, serta penataan alur antrean pelayanan agar ibu dan anak mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan nyaman. Skema pendampingan ini membuktikan bahwa manajemen perencanaan yang baik pada sektor pelayanan dasar mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa secara nyata (Safitri et al., 2022).



Gambar 3. Pendampingan pelayanan kesehatan masyarakat dan penimbangan balita pada kegiatan Posyandu Desa Gajah bersama mahasiswa KKN UINSU 2026

Sumber: Dokumentasi Kegiatan KKN UINSU Desa Gajah, 2026.

Pengamatan terhadap pelaksanaan pelayanan posyandu menunjukkan peningkatan kepatuhan dan antusiasme warga dalam memeriksakan kesehatan balita mereka secara rutin. Pengelolaan data kesehatan yang rapi dan terintegrasi memudahkan aparat desa dalam menyusun rencana program bantuan dan intervensi kesehatan masyarakat untuk periode

selanjutnya. Efisiensi waktu pelayanan dan kerapian administrasi posyandu menjadi bukti konkret keberhasilan penerapan fungsi manajemen perencanaan pada unit pelayanan publik di tingkat desa. Sinergi antara kader posyandu, perangkat desa, dan mahasiswa KKN UINSU 2026 menciptakan standar pelayanan sosial yang lebih responsif dan humanis (Pangeswari & Priyanti, 2023).

Kolaborasi Kemasyarakatan dan Edukasi Keagamaan dalam Penguatan Birokrasi Desa

Rangkaian akhir program pengabdian ditandai dengan penguatan sinergi antara mahasiswa KKN UINSU 2026, aparatur desa, tokoh agama, dan generasi muda Desa Gajah melalui kegiatan keagamaan dan edukasi kemasyarakatan. Pendekatan partisipatif berbasis nilai religius dan kebersamaan digunakan untuk membangun komitmen bersama dalam merawat keberlanjutan hasil program pelayanan publik. Berdasarkan pengamatan di lapangan, integrasi nilai-nilai keagamaan dan etika pelayanan publik berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif aparatur dan warga untuk saling mendukung penciptaan tata kelola desa yang jujur, amanah, dan melayani. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan lomba edukatif bagi anak-anak desa menjadi sarana mempererat hubungan emosional serta komunikasi antara pemerintah desa dan warga (Sussilo & Sukmana, 2024).



Gambar 4. Penguatan silaturahmi dan foto bersama tim mahasiswa KKN UINSU 2026 bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda Desa Gajah

Sumber: Dokumentasi Kegiatan KKN UINSU Desa Gajah, 2026.

Peningkatan efektivitas pelayanan publik dan kesadaran berorganisasi di Desa Gajah terbukti dari berlanjutnya koordinasi mandiri antara aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan hingga akhir masa KKN. Pola pendampingan berbasis kolaborasi ini mentransformasi kebiasaan kerja yang pasif menjadi pelayanan publik yang proaktif dan berorientasi pada kepuasan warga. Keberlanjutan partisipasi aktif masyarakat membuktikan bahwa penggabungan antara manajemen perencanaan kerja dan pendekatan kearifan lokal

keagamaan mampu menghasilkan perubahan tata kelola birokrasi desa yang permanen dan harmonis (Laoli et al., 2025).

Pembahasan

Integrasi Manajemen Perencanaan dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi Desa

Penerapan fungsi manajemen perencanaan dalam tata kelola birokrasi Desa Gajah terbukti efektif dalam meningkatkan keteraturan operasional dan kecepatan pelayanan publik. Berdasarkan temuan di lapangan, perencanaan kerja yang terstruktur membantu aparatur desa membagi peran secara jelas serta menyusun prioritas pelayanan harian. Kehadiran mahasiswa KKN UINSU 2026 sebagai fasilitator mempercepat proses adopsi standar pelayanan yang lebih akuntabel. Temuan ini mengonfirmasi bahwa penataan manajemen perencanaan sejak tahap awal merupakan kunci utama untuk mengatasi ketidakefisienan birokrasi di tingkat desa (Hidayat, 2024).

Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Pendampingan Partisipatif

Dilihat dari dimensi efektivitas, pendampingan langsung pada sektor administrasi kependudukan dan layanan posyandu mampu memotong waktu tunggu serta meminimalisasi kesalahan pendataan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan kader dan aparatur desa secara aktif mendorong terciptanya pelayanan yang responsif dan transparan. Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui peragaan langsung dan diskusi interaktif terbukti lebih efektif dibanding sekadar instruksi formal, sehingga menciptakan perubahan perilaku kerja yang berkelanjutan di kantor Desa Gajah (Noviyanti et al., 2022).

Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa dalam Transformasi Tata Kelola

Program KKN UINSU 2026 di Desa Gajah menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam mendorong inovasi tata kelola pemerintahan lokal. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membawa pendekatan akademis praktis untuk menyelesaikan hambatan pelayanan publik di lapangan. Sinergi ini terbukti menghasilkan formulasi pendampingan birokrasi desa yang terukur, aplikatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta kepuasan masyarakat (Aminah et al., 2025).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen perencanaan aparatur desa melalui pendampingan KKN UINSU 2026 di Desa Gajah berhasil mentransformasi sistem pelayanan publik menjadi lebih terstruktur, efisien, dan responsif. Melalui sintesis antara penataan lingkungan kerja kantor desa, pendampingan teknis

administrasi kependudukan, penguatan layanan sosial posyandu, serta pendekatan kolaboratif berbasis nilai kemasyarakatan, kapasitas harian aparatur desa meningkat secara signifikan. Efektivitas pelayanan publik terbukti mengalami peningkatan yang ditandai dengan alur administrasi yang lebih cepat, pendataan kesehatan yang akurat, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi desa. Sinergi antara pendekatan akademis terapan dan partisipasi aktif aparatur serta warga Desa Gajah ini membuktikan efektivitas model pendampingan KKN tematik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang mandiri, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima di Sumatera Utara.

REFERENSI

- Aminah, S., Turiman, T., & Saliro, S. S. (2025). Peningkatan pelayanan publik pemerintah desa berbasis digital di Desa Parit Keladi. *Nuras: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(4), 215–225. <https://doi.org/10.36312/nuras.v5i4.649>
- Aneta, Y., Prahara, S., Aneta, A., & Ahmad, J. (2023). Optimizing village bureaucracy transformation: Gorontalo, Indonesia. *Policy & Governance Review*, 7(3). <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i3.775>
- Hebrin, F., & Sulistyowati, A. (2022). Kinerja pemerintah desa dalam pemberian pelayanan (Studi kasus di Desa Kapatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(3). <https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/153>
- Hidayat, T. S. (2024). Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) melalui pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi di Desa Sembalun. *JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 72–78. <https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.306>
- Irfansyah, I. (2024). Pelatihan manajemen pelayanan publik bagi perangkat desa di Gampong Ie Meulee Kota Sabang. *Celebes Journal of Community Services*, 3(1), 192–201.
- Kusumawati, R. E., & Yuliani, N. L. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa, good government governance, kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. *Borobudur Accounting Review*, 2(2), 80–93. <https://doi.org/10.31603/bacr.7059>
- Laoli, A. S., Lase, D., Halawa, O., & Gulo, H. (2025). Evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Hilimbowo Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3350–3361. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1655>
- Novianti, R. D., & Agustina, I. F. (2024). Village information system (SID) effectiveness in improving village administrative services. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1367>
- Noviyanti, D., Atthahara, H., Adiarsa, S. R., & Priyanti, E. (2022). Efektivitas kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik kepada masyarakat di Desa Balongsari. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 289–297. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6470284>

- Nurfadilah, R., & Priyanti, E. (2023). Efektifitas pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Mekarjaya. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 6998–7001. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.17953>
- Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik dan Agama*, 9(1), 13–24. <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i1.1493>
- Pangeswari, G., & Priyanti, E. (2023). Efektivitas kinerja pemerintahan Desa Margasari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang wilayah pedesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i1.157>
- Purnomo, A., Setiyono, B., & Yuwanto. (2023). Efektivitas kerja: Pemerintah desa dalam mengelola dana desa. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 101–106. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4303>
- Rosandy, M. R., & Rodiyah, I. (2023). Village apparatus performance in population administration services in village. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 14(1). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i1.860>
- Safitri, S. D., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2022). Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(5), 784–792. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i05.582>
- Saputra, W., & Yuza, A. F. (2024). Efektivitas pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(4), 629–636.
- Suhartatik, M. A., & Rodiyah, I. (2024). Implementation of the Sipraja program in public administrative services. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(3). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1415>
- Sulistio, E. B., Hutagalung, S. S., & Fadoli, M. I. (2023). Analisis kompetensi aparatur pemerintah desa dalam perumusan kebijakan desa (Suatu studi di Tiyuh Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022). *Administratio*, 14(1), 83–97. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i1.367>
- Sussilo, T., & Sukmana, H. (2024). Population administration services and village government performance analysis. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1332>
- Utami, F. R., & Mursyidah, L. (2024). Improving the quality of public services from an Indonesian village perspective: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dilihat dari wawasan desa Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(3). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1389>